

**ANALISIS PENERAPAN SAK-ETAP PADA KPRI
KARYA MAJU PGRI KECAMATAN BENAI**

SKRIPSI



Oleh :

**HIFSA WULANDARI
160412019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN SAK-ETAP PADA KPRI
KARYA MAJU PGRI KECAMATAN BENAI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**HIFSA WULANDARI
160412019**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hifsa Wulandari
NPM : 160412019
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai"**.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 16 Juli 2020
Yang membuat Pernyataan



Hifsa Wulandari
HIFSA WULANDARI
NPM. 160412019

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahanrahmat, kesempatan, hidaya-Nya, kegigihan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kepada peneliti.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rina Andriani,SE.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Rektorat Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tukimun, S.Sos selaku ketua pengurus KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai yang telah berkenaan memberikan ijin peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Jomaris, S.pd selaku Bendahara di KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayah Nurjas, Ibu tercinta Devi Rahayu yang telah memberikan Do'a, Cinta, Motivasi dan kasih sayang yang tulus setiap waktu kepada penulis, dan abang serta kedua kakak ipar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, pertanyaan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
11. Sahabat-sahabatku Riris Agustin, Septria Yoga Irawan, dan Alfi Ahmat Fauzi yang telah setia menemani, memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sukses buat kita semua.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 khususnya kelas B, terimakasih atas masukan dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Akademik Universitas Islam Kuantan Singingi umumnya, serta bagi Mahasiswa/I Program Studi Akuntansi khususnya.

Teluk Kuantan, 23 Juni 2020
Penulis

Hifsa Wulandari
NPM. 160412019

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SAK-ETAP PADA KPRI KARYA MAJU PGRI KECAMATAN BENAI

Hifsa Wulandari
Rina Andriani, SE.,M.Si
Zul Ammar,SE.,ME

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Laporan Keuangan Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai dengan SAK-ETAP (Edisi 2016). Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara Laporan Keuangan SAK-ETAP dengan KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Laporan Keuangan pada Koperasi Karya Maju PGRI belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP, padahal di dalam Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP ada 5 Laporan keuangan: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk Laporan Keuangan yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai Tahun 2018 hanya ada 4 yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, sedangkan untuk Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dicantumkan.

Dari 4 Laporan Koperasi Karya Maju PGRI, Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan SAK-ETAP, akan tetapi untuk Laporan Arus Kas kurang sesuai karena tidak ditemukan sabagian akun yang ada di Koperasi tidak sesuai dengan SAK-ETAP.

Kata Kunci: *SAK-ETAP, Laporan Keuangan, Koperasi*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SAK-ETAP AT KPRI KARYA MAJU PGRI KECAMATAN BENAI

Hifsa Wulandari
Rina Andriani, SE.,M.Si
Z ul Ammar, SE.,ME

This study aims to analyze the suitability of the Cooperative Karya Maju PGRI District Benai with SAK-ETAP (2016 Edition). Data were collected using interview and documentation methods. After the data was collected, a comparative descriptive analysis was carried out, namely comparing the SAK-ETAP Financial Satatements with KPRI Karya Maju PGRI Benai District. Based on the result of the analysis that has been done, it can be concluded that:

The financial statements of the Karya Maju PGRI cooperative are not fully in accordance with SAK-ETAP, even though in the financial statements according to SAK-ETAP there are 5 financial reports: Balance sheet, income statement, change in equity report, cash flow statement, notes on financial statements. Whereas for the financial statements in the Karya Maju cooperative Benai District in 2018, there are only 4, namely the balance sheet, income statements, change in equity report and cash flow statement, while notes to financial statements are not included.

Of the 4 reports of the Karya Maju PGRI cooperative, the balance sheet, income statement and change in equity report are in accordance with SAK-ETAP, however the cash flow statement is not suitable because it is not found that some accounts in the cooperative are not in accordance with SAK-ETAP.

Keywords: SAK-ETAP, Financial statements, the cooperative.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Koperasi	8
2.1.2 Tujuan Koperasi.....	10
2.1.3 Fungsi dan Prinsip Koperasi	10
2.1.4 Landasan dan Asas Koperasi	11

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi	12
2.1.6 Ciri-ciri Koperasi	13
2.2 Pengertian Akuntansi	13
2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)	16
2.3.1 Karakteristik SAK-ETAP.....	17
2.3.2 Manfaat Penerapan SAK-ETAP	18
2.4 Laporan Keuangan	19
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	19
2.4.2 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan	21
2.5 Standar Akuntansi Keuangan Untuk Koperasi	23
2.5.1 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi sebelum ditetapkan SAK-ETAP	23
2.5.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Koperasi	24
2.5.3 Pos-pos Laporan Keuangan SAK-ETAP	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
2.7 Kerangka Pemikiran	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu.....	43
3.3 Populasi dan Sampel	44
3.3.1 Populasi	44
3.3.2 Sampel	44
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5.1 Dokumentasi.....	45
3.5.2 Wawancara.....	45
3.6 Teknik Analisis Data	46

3.7 Tahap-Tahap Penelitian.....	46
---------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	48
4.1.1 Profil Perusahaan	48
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	49
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	49
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Neraca.....	58
4.2.2 Laba Rugi	59
4.2.3 Perubahan Ekuitas	60
4.2.4 Laporan Arus Kas	61
4.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	63
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Karya Maju PGRI dengan SAK-ETAP	64
4.3.2 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Neraca Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	64
4.3.3 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI.....	65
4.3.4 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI.....	67
4.3.5 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Arus Kas Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	68
4.3.6 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Anggota Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	5
2.1 Neraca	27
2.2 Laba Rugi	29
2.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	30
2.4 Laporan Arus Kas	34
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	37
3.1 Rincian Waktu Penelitian	44
4.1 Neraca Koperasi	58
4.2 Laporan Laba Rugi Koperasi	60
4.3 Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi	61
4.4 Laporan Arus Kas Koperasi	62
4.5 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Neraca Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	64
4.6 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	66
4.7 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	67
4.8 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Arus Kas Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
4.1 Struktur Organisasi Koperasi KPRI Karya Maju PGRI.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Laporan Keuangan Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 5	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2010:3)

Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan laba sebagai tujuan utama karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (Melisa, 2010:17).

Setiap perusahaan pada akhir periode harus menyusun laporan keuangan dalam rangka melihat posisi keuangan dan laba yang dihasilkan. Adri (2012:3) mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan guna pengambilan keputusan ekonomi.

Saat ini ada 5 macam standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan satu acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yaitu PSAK-IFRS, SAS, SAP, SAK-ETAP dan SAK-EMKM. Standar yang telah

ditetapkan ini banyak dipakai oleh kebanyakan entitas, baik swasta maupun lembaga Negara.

Di Indonesia untuk standar penyusunan Laporan Keuangan Koperasi selain menggunakan Standar Akuntansi Keuangan *International Financial Reporting Standar* (SAK-IFRS) sudah memiliki standar sendiri yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai serta dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan sendiri untuk Koperasi, maka permasalahannya adalah penulis ingin mengetahui Laporan Keuangan yang ada di KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai telah menerapkan dan kesesuaiannya dengan SAK-ETAP. Hal tersebut juga dijelaskan dalam peraturan menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 3 tentang Pedoman Akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi memutuskan dasar penyusunan laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi, yaitu: Standar Akuntansi Keuangan *International Financial Reporting Standar* (SAK-IFRS) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

. SAK-ETAP ini sangat membantu perusahaan kecil seperti UKM karena tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK Umum yang berlaku. Meskipun SAK-ETAP lebih sederhana dibandingkan PSAK, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetaplah handal.

Menyusun Laporan Keuangan merupakan siklus akuntansi laporan keuangan dimulai dari pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun Neraca Saldo, jurnal penyesuaian, Neraca Lajur sampai

pelaporan keuangan (Mulyadi, 2016:31). Menurut SAK-ETAP (2016:3) Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Laporan keuangan yang umumnya di buat oleh koperasi berisi Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan pendukung lainnya. Sebagai suatu lembaga tanpa akuntabilitas publik, bahwa laporan keuangan Koperasi merujuk pada SAK-ETAP. Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2016), Laporan keuangan dalam SAK-ETAP terdiri dari:

1. Neraca, neraca menyajikan asset lancar, asset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut ini : kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan utang lanjutnya, asset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas.
2. Laporan Laba Rugi, laporan laba rugi menghasilkan penghasilan dan beban entitas untuk satu periode, informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi yaitu: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba rugi neto.
3. Laporan Perubahan Ekuitas, laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk satu periode tersebut, untuk setiap komponen ekuitas (suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat dari awal dan akhir periode yang di ungkapkan secara terpisah yang berasal dari: laba atau rugi, pendapatan atau

beban, jumlah investasi).

4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penerbitan SAK-ETAP ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pencatatan keuangan bagi Koperasi di Indonesia dan juga di Kecamatan Benai sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK-ETAP ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku koperasi di Kecamatan Benai dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Maka, seharusnya SAK-ETAP ini diimplementasikan secara optimal.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Selatan Provinsi Riau yang memiliki perkembangan Koperasi yang cukup baik. Dengan banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya berada di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai bernama KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai. KPRI merupakan singkatan dari koperasi itu sendiri, yang beralamat Jl. Agus Salim No. 84 Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis koperasi ini berupa simpan pinjam bagi Guru-guru sekolah di seluruh Kecamatan Benai.

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai adalah sebuah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan Waserda (warung serba ada). Koperasi ini berdiri sejak tahun 1997 hingga sekarang. Sebagai unit usaha

yang melakukan kegiatan ekonomi maka Unit Simpan Pinjam KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai harus membuat laporan keuangannya. Peneliti mengambil laporan keuangan pada Tahun Buku 2018 yang akan di analisa apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan SAK-ETAP.

Pada unit simpan pinjam, KPRI melakukan pengelolaan uang simpanan pokok, simpanan sukarela dan simpanan wajib anggota koperasi yang mana simpanan wajib dikutip dari potongan pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) seluruh anggota koperasi setiap bulannya.

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai adalah unit Simpan Pinjam KPRI yang beranggotakan pegawai yang berada dilingkungan sekolah seluruh Kecamatan Benai. Keanggotaan usaha Simpan Pinjam KPRI hingga akhir tahun 2017 sebanyak 472 orang, Tahun 2018 sebanyak 407 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 409 orang. Berikut data seluruh anggota KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

Tabel 1.1
Data Anggota Tahun 2017, 2018 dan 2019

NO	Keterangan	Anggota		
		2017	2018	2019
1.	Guru SD	268	49	215
2.	Guru SMP atau SLTP	89	176	87
3.	Guru SMK	20	20	27
4.	Guru SMA	44	39	48
5.	Kacap	7	6	5
6.	Bayar sendiri	44	40	27
Jumlah		472	407	409

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai ini bertujuan untuk membantu para Guru-guru baik PNS maupun Honorer, karena sulitnya proses pinjam meminjam melalui Bank, oleh karena itu Guru-guru di

Kecamatan Benai membentuk koperasi ini pada tahun 1997 sebagai perkumpulan bersama guru sekecamatan benai sesuai dengan aturan yang telah disepakati yang diadakan setiap akhir tahun melalui Rapat Anggaran Tahunan (RAT). Dan setiap di adakan rapat tahunan anggota membahas tentang berapa simpanan pokok, simpanan wajib, jumlah angsuran dan berapa kali pembayaran yang diperbolehkan dalam setiap bulannya. ketentuan ini diputuskan bersama oleh anggota yang ada di dalam anggota koperasi tersebut.

Sebagai suatu badan usaha KPRI dituntut untuk meningkatkan dan memberdayakan anggotanya. Terlebih dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha maka peranan KPRI hendaknya semakin berkembang. Agar KPRI mampu menjalankan peranannya tersebut, maka di dalam KPRI dibutuhkan suatu mekanisme struktur keuangan Koperasi dapat terjaga dengan aman dan baik.

Oleh karena itu penelliti memilih untuk meneliti di koperasi ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah koperasi tersebut telah sesuai dengan penerapan SAK-ETAP.

Berdasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam judul **“Analisis Penerapan SAK-ETAP pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah Laporan

Keuangan Unit Simpan Pinjam KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai sudah sesuai dengan SAK-ETAP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai dengan SAK-ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai Penerapan SAK-ETAP Pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, Untuk menambah ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan SAK-ETAP pada Koperasi simpan pinjam.
2. Bagi pihak Unit Simpan Pinjam KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai, Penelitian ini diharapkan menjadi masukkan sebagai bahan informasi bagian keuangan pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sbagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang,seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Menurut *International Identity Statement* (Manchester, 23 September 1995), Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Koperasi (pasal 44 UU No 25/1992 tentang Perkoperasian) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam (Apriadi, 2018) dari dan untuk:

1. Anggota koperasi
2. Koperasi lain dan/atau anggotanya

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan PP 9 Tahun 1995.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Apriadi, 2018).

Pengertian koperasi menurut Rudianto (2010:3) Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan menurut Adenk (2013:4) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Baswir (2013: 21), Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Sedangkan menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi (2012:21) koperasi adalah perkumpulan manusia yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Menurut SAK-ETAP Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suku guru perekonomian nasional.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan untuk Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Apriadi, 2018).

2.1.3 Fungsi dan Prinsip Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai srukurnya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012, Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

2.1.4 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pancasila ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Landasan idiil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi (Apriadi, 2018).

Pancasila dijadikan sebagai landasan idiil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengemban fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural

Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 3 disebutkan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Apriadi (2018) jenis koperasi dapat menjadi:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

2. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang kebutuhan sehari-hari misalnya:

- a. Barang pangan seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa
- b. Barang sandang seperti kain batik, tekstil dan sebagainya
- c. Barang pembantu keperluan sehari-hari seperti sabun, minyak tanah

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa

tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum.

2.1.6 Ciri-ciri Koperasi

Koperasi di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan kumpulan beberapa orang dan bukan kumpulan modal. Maksudnya adalah koperasi mempunyai fungsi untuk mensejahterakan para anggotanya.
2. Semua kegiatan yang terjadi didalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial.
3. Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi didasari pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman, atau campur tangan dari berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
4. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya.

2.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu aktivitas dalam mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan dan mengikhtisar sebuah transaksi ekonomi atau kejadian yang dapat menghasilkan data kuantitatif terutama yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan (Putra, 2017:48)

SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal tau entitas fidusial (entitas yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Ada beberapa aktivitas utama dalam Akuntansi

yaitu:

1. Aktivitas mengidentifikasi yaitu melakukan proses mengenali segala transaksi yang ada dalam perusahaan.
2. Aktivitas mencatat yaitu segala aktivitas yang dilakukan untuk mencatat seluruh transaksi yang pernah terkenali secara sistematis dan kronologis.
3. Aktivitas komunikasi yaitu tindakan untuk menyampaikan informasi akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan atau pihak yang memiliki kepentingan baik pihak yang ada dalam perusahaan maupun pihak yang ada di luar perusahaan.

Menurut Putra (2017:51) Daam ilmu akuntansi juga telah berkembang beberapa bidang khusus yang di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah dan ukuran perusahaan serta dari peraturan pemerintah. Kemudian adapun beberapa bidang-bidang akuntansi yang sudah mengalami perkembangan tersebut yaitu:

1. Akuntansi keuangan yang mencakup segala pencatatan transaksi-transaksi dalam perusahaan dan melakukan penyusunan laporan secara berkala di mana laporan itu akan memberuikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen para kreditur dan pemilik.
2. Pemeriksaan akuntansi atau auditing merupakan bidang yang mencakup pemeriksaan laporan keuangan dengan melalui catatan akuntansi secara bebas berupa laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kebenarannya dan kejujurannya.
3. Akuntansi menejemen merupakan suatu bidang yang menggunakan data historis dan data taksiran dalam membantu proses manajemen untuk merencanakan segala operasi yang akan terjadi di masa mendatang.

4. Akuntansi perpajakan yang mencakup pada penyusunan segala laporan pajak dan memberikan pertimbangan terhadap konsekuensi dari transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. Akuntansi budgeter merupakan bidang akuntansi yang bertugas merencanakan segala aktivitas keuangan atau anggaran dalam suatu periode dan memberikan sebuah perbandingan antara segala operasi yang sebenarnya dengan operasi yang akan direncanakan.
6. Akuntansi biaya adalah bidang yang bertugas menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta melakukan pengendalian biaya tersebut yang terdapat dalam suatu perusahaan industry.
7. Sistem akuntansi adalah semua teknik, metode dan prosedur dengan mencatat dan mengolah segala data akuntansi dalam rangka untuk memperoleh segala pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang mengendalikan dengan diperoleh dari adanya struktur organisasi.
8. Akuntansi sosial adalah bidang yang paling terbaru dalam akuntansi dan sulit untuk diterangkan karena menyangkut dana kesejahteraan masyarakat.

Untuk persamaan akuntansi menurut Putra (2017:33-34) adalah:

1. Hak kreditur. Mencerminkan uang perusahaan dan disebut liabilitas
2. Hak pemilik disebut juga ekuitas pemilik ($Aset = Liabilitas + Ekuitas$)
persamaan ini dikenal dengan persamaan akuntansi. Liabilitas biasanya disebutkan sebelum ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi karena kreditur memiliki hak pertama atas aset. Apabila kedua nilai telah diketahui, persamaan akuntansi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai ketiga.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Menurut Setiyowati, dkk (2018:12) Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak dimiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*). Standar ini mengadopsi IFRS untuk *Small Medium Enterprise (SME)* dengan beberapa penyederhanaan.

Menurut Wuwungan (2015) menyatakan bahwa Standar Akuntabilitas Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan Laporan Keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK NO 27 Tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011.

Menurut IAI dalam SAK-ETAP (Edisi 2016) Pragraf 1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK-ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan

tidak mengacu pada SAK-IFRS, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Badan usaha yang tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik adalah Entitas Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas, yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Yang termasuk ke dalam UKM yaitu CV dan koperasi.

Penggunaan ETAP diarahkan untuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan dalam menerapkan SAK secara penuh. Sama dengan *International Financial Reporting Standar untuk Small Medium Enterprise* (IFRS untuk SME), SAK-ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik.

SAK-ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. SAK-ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.3.1 Karakteristik SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

ETAP adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal.
3. Menggunakan acuan IFRS untuk *small medium enterprises*.
4. Lebih sederhana antara lain:

- a. Asset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan
 - b. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode.
 - c. Mengacu pada praktek akuntansi yang saat ini digunakan.
5. Kualitatif informasi dalam laporan keuangan (dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat).
 6. SAK-ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi asset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *matching concept*.
 7. Saling hapus tidak diperkenankan atas asset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban kecuali di isyaratkan atau diizinkan oleh SAK-ETAP.

Menurut IAI dalam SAK-ETAP 1.3 (2016) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP.

Menurut DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI dalam SAK-ETAP (2016) SAK-ETAP merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK-ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup SAK-ETAP, termasuk UMKM.

2.3.2 Manfaat Penerapan SAK-ETAP

SAK-ETAP memiliki beberapa manfaat untuk diterapkan, diantaranya adalah:

1. Diharapkan dengan adanya SAK-ETAP, perusahaan kecil menengah mampu untuk:
 - a. Menyusun laporan keuangannya sendiri
 - b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
2. sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
3. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
4. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Hery (2018:3) Laporan Keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Menurut Setiyowati, dkk (2018:6) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan merupakan alat pokok yang secara format digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan.

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:1) adalah Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi bank, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan, laporan keuangan disusun oleh akuntan pada akhir periode suatu perusahaan.

Sedangkan urutan Laporan Keuangan menurut Hery (2018:3) sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama satu periode akuntansi.
2. Neraca, yaitu suatu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode.
4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyediakan informasi perubahan kas meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, yaitu berupa catatan mengenai pos-pos yang berguna untuk memberi informasi tambahan.

Menyusun laporan keuangan merupakan siklus akuntansi laporan keuangan dimulai dari pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur sampai pelaporan keuangan (Mulyadi, 2016:31).

Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. Laporan keuangan koperasi sektor riil harus berdaya guna bagi para anggotanya,

sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui :

1. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu.
2. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu.
3. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang

Menurut SAK-ETAP Laporan Keuangan adalah laporan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.4.2 Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut SAK-ETAP (2016:3) Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Menurut Hery (2018:4) Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun tujuan laporan keuangan menurut Hery (2018:4) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.

Menurut Hery (2018:7) Karakteristik Laporan Keuangan adalah:

1. Dapat dipahami adalah kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
2. Relevan adalah agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas adalah informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. Keandalan adalah agar bermanfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal.
5. Substansi mengungguli bentuk adalah transaksi, peristiwa dan kondisi lain

harus dicatat dan disajikan sesuai realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

6. Pertimbangan sehat adalah ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut melalui pengguna pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
7. Kelengkapan adalah agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
8. Dapat dibandingkan adalah pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.
9. Tepat waktu adalah agar relevan informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai.

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Untuk Koperasi

2.5.1 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi sebelum ditetapkannya

SAK-ETAP

Sebelum diterapkannya SAK-ETAP, peraturan dalam penyusunan pelaporan terkandung dalam prinsip akuntansi Indonesia yang mana mengadopsi *United States General Accepted Accounting Principal* (US-GAAP). Setelan Indonesia mulai berkiblat ke IFRS namun belum diterapkan, standar akuntansi keuangannya menjadi pernyataan satuan akuntansi keuangan dimana Bentuk dan Format laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasaan (Revisi 1998) yang akhirnya dicabut pada 23 Oktober 2010, yang diakibatkan dengan diadopsinya *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai standar pelaporan keuangan Internasional (Yelitasari, 2016).

2.5.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akutntabilitas Publik (SAK-ETAP) Untuk Koperasi

Menurut IAI dalam SAK-ETAP (Edisi 2016) Paragraf 1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Menurut IAI dalam SAK-ETAP 1.2 (2016), entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Menurut IAI dalam SAK-ETAP 1.3 (2016) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas

berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK-ETAP.

Menurut DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI dalam SAK-ETAP (2016) SAK-ETAP merupakan pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah SAK umum berbasis IFRS. SAK-ETAP diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana telah dijelaskan dalam ruang lingkup SAK-ETAP, termasuk UMKM.

2.5.3 Pos-Pos Laporan Keuangan SAK-ETAP

Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2016), Laporan Keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK-ETAP 3.12 (2016) laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

A. Neraca (SAK-ETAP bab 4)

Informasi yang disajikan dalam Neraca (SAK-ETAP pada Pragraf 4.2).

Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara Kas.
- b. Piutang usaha dan Piutang lainnya.
- c. Persediaan
- d. Properti Investasi
- e. Aset Tetap
- f. Aset Tidak Berwujud
- g. Uang usaha dan Utang lainnya
- h. Aset dan Kewajiban Pajak
- i. Kewajiban Diestimasi
- j. Ekuitas

Paragraf 4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap

posisi keuangan entitas. SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Paragraf 4.7 Entitas mengklasifikasikan semua asset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Paragraf 4.9 Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Paragraf 4.10 Urutan dan Format pos dalam Neraca. SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan, hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca, sebagai tambahan:

- a) Pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas.
- b) Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.

Tabel 2.1
Neraca
Per 31 Desember 20x1

Aktiva		Kewajiban dan Ekuitas	
Aktiva Lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas	xxx	Simpanan anggota	xxx
Piutang usaha	xxx	Simpanan sukarela	xxx
Piutang pinjaman anggota	xxx	SHU bagian anggota	xxx
Piutang pinjaman non-anggota	xxx	Utang usaha	xxx
Persediaan	<u>xxx</u>	Utang Pajak	xxx
Pajak dibayar di muka	xxx	Dana	<u>xxx</u>
Jumlah aset lancar		Jumlah kewajiban Lancar	xxx
		Kewajiban jangka panjang	
Aktiva Tidak Lancar		Hutang Bank	xxx
Harga Perolehan	xxx	Hutang Non-Bank	<u>xxx</u>
Akm. Penyusutan	<u>xxx</u>	Jumlah	xxx
Total Aktiva	xxx	Ekuitas	
		Simpanan pokok	xxx
		Simpanan wajib	xxx
		Hibah	xxx
		Cadangan	xxx
		SHU tahun berjalan	<u>xxx</u>
		Jumlah ekuitas	xxx

Sumber: Warsidi,CA (2017)

B. Laporan Laba Rugi (SAK-ETAP bab 5)

Laporan Laba Rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. SAK-ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian

terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Paragraf 5.3 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi neto

Paragraf 5.4 Entitas harus menyajikan pos judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Paragraf 5.5 Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagian pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.2
Laba Rugi
Per 31 Desember 20x1

Pelayanan anggota	
Pelayanan Bruto	xxx
Beban Pokok Penjualan	<u>(xxx)</u>
Pelayanan Neto	xxx
Pendapatan dari non-anggota	
Penjualan pada non-anggota	xxx
Beban Pokok Penjualan	<u>(xxx)</u>
Laba non anggota	xxx
SHU Kotor	xxx
Beban operasional Beban Usaha	
Beban Perkoperasian	xxx
Beban Operasional Lain	xxx
Total Beban Operasional	xxx
SHU Operasional	<u>(xxx)</u>
	xxx
Pendapatan dan Beban lain	
Pendapatan lain	
Beban lain	xxx
SHU sebelum bunga dan pajak	<u>(xxx)</u>
Beban Pajak Penghasilan	xxx
SHU setelah pajak	<u>(xxx)</u>
	Xxx

Sumber: Warsidi, CA (2017)

C. Laporan Perubahan Ekuitas (SAK-ETAP bab 6)

Paragraf 6.2 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut.

Paragraf 6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- a. Laba atau rugi untuk periode
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan.
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 1. Laba atau rugi.
 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
 3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Ekuitas

Modal Awal		Xxx
Penambahan		
Simpanan Pokok	Xxx	
Simpanan Wajib	Xxx	
Cadangan	Xxx	
SHU	Xxx	
Total Penambahan	Xxx	
Pengurangan		
Simpanan Pokok	(Xxx)	
Simpanan Wajib	(Xxx)	
Cadangan	(Xxx)	
SHU	<u>(Xxx)</u>	
Jumlah perubahan		<u>Xxx</u>
Modal Akhir 31 Desember 2018		Xxx

Sumber: Warsidi, CA (2017)

D. Laporan Arus Kas (SAK-ETAP bab 7)

Paragraf 7.1 Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Informasi yang disajikan dalam laporan Arus Kas Paragraf 7.3, Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut:

1. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan Laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain.
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh asset (termasuk asset tetap yang dibangun sendiri), asset tidak berwujud, dan asset jangka panjang lainnya.

- b. Penerimaan kas dari penjualan asset tidak berwujud, dan asset jangka panjang lainnya.
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan).
- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas dan efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang di klasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
- f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain

3. Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menerima atau menebus saham entitas
- c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya.
- d. Pelunasan pinjaman
- e. Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

1) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan

dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak:

- a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang selama periode berjalan.
- b. Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi.
- c. Entitas pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan

2) Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari ekuisisi dan pelepasan anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

Komponen kas dan setara kas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan arus kas dengan pos yang sama disajikan dalam neraca.

Tabel 2.4
Laporan Arus Kas
31 Desember 20x1

Laba Bersih	Xxx	
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penurunan piutang simpan pinjam		(Xxx)
Penurunan kewajiban lancar		(Xxx)
Peningkatan dana pendidikan	Xxx	
Peningkatan dana social		Xxx
Kenaikan hutang pajak	Xxx	

Arus kas dari aktivitas investasi		
Penurunan investasi		(Xxx)
Peningkatan beban penyusutan	Xxx	
Arus Kas dari Aktivits Pendanaan:		
Penurunan kewajiban jangka panjang	(Xxx)	
Peningkatan simpanan pokok		Xxx
Penurunan modal		(Xxx)
Peningkatan cadangan	Xxx	
Jumlah	<u>(Xxx)</u>	
Penurunan (kenaikan) kas		Xxx
Kas awal periode		<u>Xxx</u>
Kas akhir periode		Xxx

Sumber: Warsidi, CA (2017)

E. Catatan Atas Laporan Keuangan (SAK-ETAP bab 8)

Paragraf 8.1 Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Paragraf 8.2, Catatan Atas Laporan Keuangan harus:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah

sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-ETAP.
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

Pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan harus mengungkapkan:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

1. Informasi tentang pertimbangan

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi. Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

2. Informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai resiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat asset

dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait asset dan kewajiban tersebut, catatan laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang sifat dan jumlah tercatat pada periode pelaporan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya.

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Raflesia Nurdita (2012)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi yang ada di Kota Dumai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi yang ada di Kota Dumai sudah melakukan pelaporan keuangan sederhana namun hanya sebagian kecil yang benar-benar menerapkan SAK-ETAP ke dalam laporan keuangannya.

2.	Mulyani (2013)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang	Hasil menunjukkan bahwa Laporan keuangan Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang Tidak Sesuai SAK-ETAP.
3.	Andriani dan Lilya (2014)	Analisis penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK-ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Peggy Salon)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan SAK-ETAP pada Peggy Salon karena kurangnya pemahaman, kedisiplinan, dan sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan dari <i>stakeholder</i> yang berkepentingan dengan laporan keuangan Interpretatif pada Peggy Salon.
4.	Fajar Teguh Nur Cahyo (2014)	Analisi Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi Batari di Desa Medan Klaten	Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Batari belum menyajikan laporan keuangan secara sederhana. Pihak Kopersi Batari belum melakukan

			penerapan SAK ETAP secara penuh sebagai standar dalam penyusunan pelaporan keuangan Koperasi Batari.
5.	Ariantini (2014)	Penerapan SAK-ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembing Sejahtera Mandiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyajian laporan keuangan KSP Lembing Sejahtera Mandiri tahun 2013 terdiri atas laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha, (2) penyajian laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP terdiri atas (a) laporan neraca (b) laporan sisa hasil usaha (c) laporan perubahan ekuitas (d) laporan arus kas dan (e) catatan atas laporan keuangan, dan (3) penerapan SAK-ETAP berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembing Sejahtera Mandiri tahun 2013 sebesar Rp.34.960.000,00 karena adanya biaya yang tidak tercatat seperti biaya honor pengurus, biaya pelatihan, biaya sosial, dan biaya pembangunan daerah kerja.
6.	Arri Alfitri (2014)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten	Kesimpulannya adalah masih banyak pelaku UKM yang belum menerapkan SAK-ETAP dan belum mengetahui tentang standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik SAK-ETAP

7.	Silvia Meyreni (2015)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Pasar Godanglegi	Hasil menunjukkan bahwa proses pelaksanaan siklus akuntansi yang ada KPG tidak membuat pencatatan dalam buku jurnal dan buku besar. KPG hanya melakukan tahap Pengkhtisaran dengan membuat neraca saldo, pada tahap penyajian KPG hanya menyajikan Laporan neraca dan laba rugi.
8.	Fitriani seragih (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaian dengan SAK-ETAP Pada UKM Medan Perjuangan	Penerapan akuntansi dilihat dari Penyajian Pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar UKM hanya membuat laporan laba-rugi. Penerapan akuntansi yang dilakukan UKM di Jalan Seram, kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan SAK-ETAP
9.	Viona Yelitasari (2016)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi (Studi kasus pada Koperasi di Bnadar Lampung)	Hasil menunjukkan bahawa dari Sembilan sampel koperasi di Bandar Lampung yang di teliti, hanya satu yang telah menerapkan SAK-ETAP.
10	Beni Apriadi (2018)	Analisis penerapan SAK-ETAP Pengukuran, Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Menghitung	Hasil penelitian ini menunjukkan bhawa (1) Pengakuan Pendapatan CU. Tunas Muda menggunakan basis kas sehingga tidak sesuai dengan SAK-ETAP dan Pengakuan Beban pada umumnya dengan basis kas terkecuali untuk penyusutan sehingga ini juga tidak sesuai dengan SAK-ETAP (2) Pengukuran Pendapatan sesuai

		Hasil Sisa Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Tunas Muda Bagan Batu	jumlah kas diterima atau masih harus diterima sesuai dengan SAK-ETAP dan sesuai dengan yang dibayarkan dan harus dibayarkan sesuai dengan SAK-ETAP (3) Format penyajian pos-pos dalam laporan sisa hasil usaha telah memenuhi standar pelaporan dalam SAK-ETA, tetapi untuk masalah jumlah tidak sesuai karena menggunakan basis kas
11	Sri Betiyoghana (2019)	Analisis Implementasi Standar Akuntanssi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Koperasi (Studi kasus Pada Koperasi Perekebenan Soko Jati dan Koperasi Parari Sejahtera Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan dengan focus penelitian yaitu pada pos-pos Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Koperasi Perkebunan Soko Jati belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-ETAP karena informasi yang disajikan tidak lengkap. Koperasi Perkebunan Soko Jati hanya menyajikan Neraca dan Laporan Laba Rugi, belum menyusun laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pos-pos dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi juga masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya berdasarkan SAK-ETAP. 2. Koiperasi Parari Sejahtera juga belum menyajikan Laporan Keaungan sesuai dengan SAK-ETAP karena informasi yang disajikan tidak lengkap. Koperasi Parari Sejahtera juga hanya menyajikan Neraca dan Laporan Laba Rugi, belum menyusun Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,

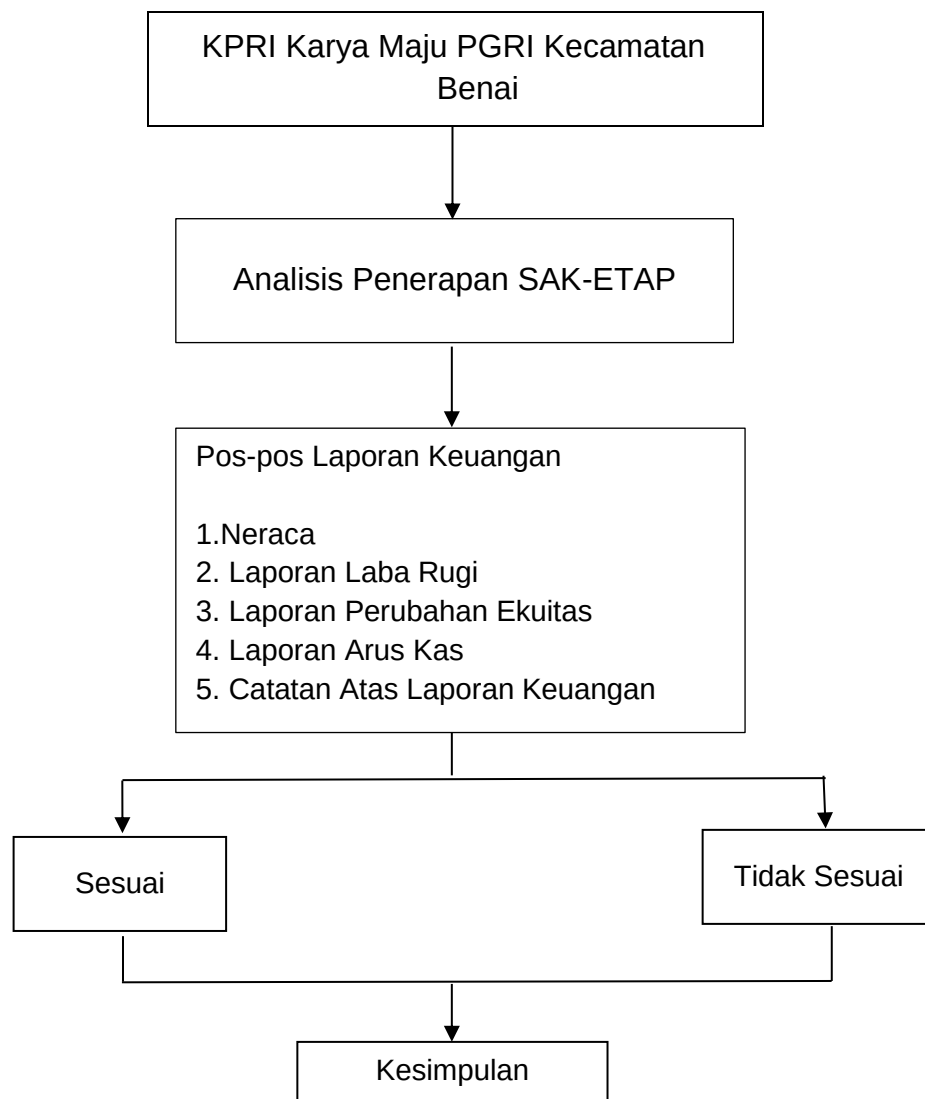
			dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pos-pos dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi juga masih terdapat sangat banyak kekurangan.
--	--	--	---

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai dapat digambarkan dalam bagian kerangka pemikiran pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Betiyohana (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Pengertian Komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian yang menjelaskan dan menguraikan tentang penerapan SAK-ETAP pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan SAK-ETAP pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

3.2 Tempat dan Waktu

Menurut Sugiyono (2012:13) Tempat penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, maka lokasi penelitian secara langsung dilakukan pada kantor Unit simpan pinjam KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai. Waktu penelitian ini dimulai dari penulisan proposal hingga akhir pengujian skripsi.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Nov 19	Des 19	Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	Mei 20	Jun 20	Jul 20
1.	Judul diterima									
2.	Melakukan penelitian dan bimbingan									
3.	Ujian proposal									
4.	Melanjutkan penelitian skripsi									
5.	Ujian skripsi									

Sumber: Data Olahan, 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai Tahun 2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu penelitian komperatif dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2011:147). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung ke pada karyawan koperasi.
2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2011:147).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh secara lengkap dari objek yang diteliti, yaitu:

3.5.1 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dari skripsi ini adalah Laporan Keuangan KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data digunakan apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara

dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2018:137).

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan penerapan SAK-ETAP dengan data-data yang ada pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Memaparkan Laporan Keuangan KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.
2. Membandingkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai dengan Laporan Keuangan SAK-ETAP.
3. Menarik kesimpulan apakah Laporan Keuangan KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai telah sesuai atau tidak sesuai dengan SAK-ETAP.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti mencoba memberikan gambaran umum demi keberhasilan mengenai tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Mulai dari menentukan konsep
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Pemilihan sampel
4. Setelah pemilihan sampel, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berupa laporan keuangan Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

5. Data yang diperoleh kemudian di Analisis dengan membandingkan Teori SAK-ETAP dengan Laporan Keuangan yang di peroleh.
6. Setelah itu dari hasil yang dibandingkan akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benail berdiri pada 10 April 1997 dan di sahkan oleh Bupati Kuantan Singingi pada Tahun 2002 dengan Akta pendirian Badan Hukum sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian Indonesia yaitu Badan Hukum Nomor 11/BH/INDAG.800.01/II/2002. KPRI Karya Maju PGRI menjalankan kegiatan simpan pinjam dan Waserda yang hanya berlaku untuk anggota koperasi saja.

KPRI Karya Maju PGRI terletak di desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Keanggotaan KPRI Karya Maju PGRI meliputi Guru-guru kecamatan benai dengan jumlah anggota pada tahun 2018 berjumlah 407 orang.

Pendirian koperasi tersebut didasarkan untuk memudahkan para guru di kecamatan benai untuk melakukan simpan pinjam yang prosesnya jauh lebih mudah dari pada proses simpan pinjam di Bank, sehingga muncul pemikiran dan keinginan untuk membentuk suatu badan usaha berbentuk koperasi.

Koperasi ini berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan azaz kekeluargaan. Koperasi ini bertujuan meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai yaitu Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai jati diri koperasi.

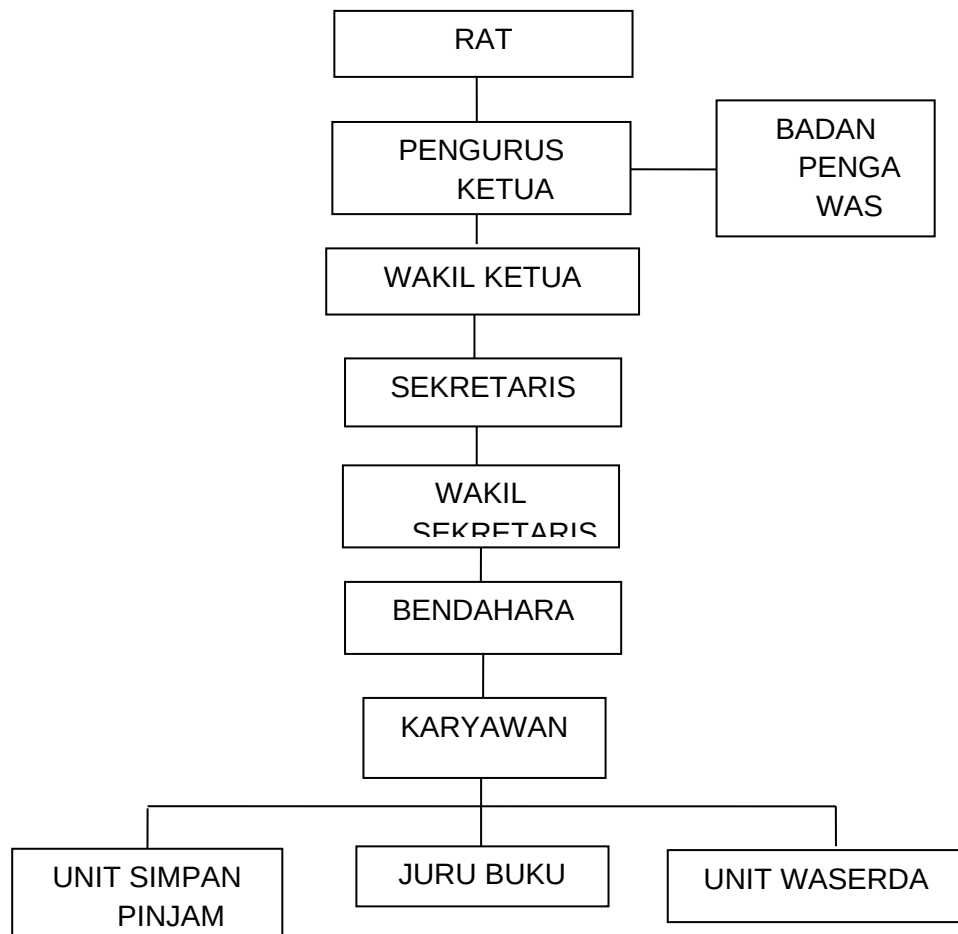
Misi KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai yaitu:

1. Menjalankan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan
2. Menjalani kerja sama usaha dengan berbagai pihak
3. Meningkatkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas pokok.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggungjawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau untuk setiap orang yang ada di dalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut. Berikut struktur organisasi KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi KPRI Karya Maju PGRI



Sumber: KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai, 2018

1. Badan Pengurus

- a. Ketua : Tukimun,S.Sos
- b. Wakil Ketua : Abdulrahman,S.Pd
- c. Sekretaris : Arnalis,S. Pd
- d. Wakil Sekretaris : Emyasda
- e. Bendahara : Jomaris, S.Pd

2. Badan Pengawas

- a. Ketua : Arfinus,S.Pd
- b. Anggota : M. Dinir
- c. Anggota : Miladi

3. Karyawan

- a. Juru Buku : Wawuk Eka Iriadi,S.Pd
- b. Unit Simpan Pinjam : Elda Mardika Ningsi,SP
- c. Unit WASEDRA : Sisramadanis Saputri

Adapun tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing sesuai dengan bagiannya sendiri:

A. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Tatahan kehidupan koperasi
2. Rapat anggota terdiri dari:
 - a. Rapat anggota untuk pertanggungjawaban pengurus diadakan dalam rangka tutup buku diselenggarakan setahun sekali, paling lambat 6 bulan setelah tutup buku .
 - b. Rapat anggota Luar Biasa dapat dilakukan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada

rapat anggota.

3. Rapat anggota yang diadakan dalam rangka pertanggungjawaban pengurus memuat Anggaran.
4. Rapat anggota mempunyai wewenang kekuasaan
5. Rapat anggota sah apabila dihadiri:
 1. Sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota
 2. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, apabila tidak tercapai kata mupakat maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
 3. Apabila jumlah anggota koperasi diatas 500 orang. Rapat anggota dapat diselenggarakan dengan sistem perwakilan dimana sebelumnya tiap-tiap kelompok membahas materi rapat anggota, dan menetapkan anggota kelompok sebagai utusan perwakilan dari kelompoknya pada rapat anggota koperasi yang akan dilaksanakan.
6. Rapat anggota Luar Biasa
 1. Rapat anggota luar biasa diadakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (2.b) dalam anggaran dasar
 2. Rapat anggota luar biasa dalam perubahan Anggaran Dasar, Pelaburan, Pembagian dan Pembubaran Sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari Jumlah Anggaran Koperasi.
 3. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
7. Dalam rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak dapat mencapai kuorum maka dapat ditunda paling lama 7 hari, dan apabila pada rapat

kedua tetap belum mencapai kuorum atas keputusan bersama rapat tersebut berlangsung dengan sah.

8. Dalam keadaan pengurus tidak dapat melakukan rapat anggota, 10% dari jumlah anggota dapat mengajukan diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila pengurus tidak melaksanakan maka anggota dapat meminta bantuan dari Pemerintah untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa.

B. Pengurus

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung atau secara formatur.
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
3. Masa kerja/jabatan pengurus 3 tahun.
4. Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota apabila terbukti melakukan kecurangan atau penyelewengan yang telah merugikan koperasi.
5. Anggota pengurus sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan organisasi yang terdiri dari unsur (ketua, sekretaris, bendahara).
6. Apabila terjadi kekosongan atau mengundurkan diri salah seorang anggota pengurus sebelum masa jabatan berakhir, maka pengurus yang lain mengadakan Rapat Pengurus untuk mengangkat gantinya baik diambil dari kalangan anggota koperasi maupun dari kalangan yang ada.
7. Pengangkatan pengurus ini dimintakan pengesahan pada rapat anggota berikutnya.

8. Dan tugas pengurus berikutnya adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
9. Kewajiban pengurus.
 - a. Menyelenggarakan buku organisasi secara tertib.
 - b. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang terdiri dari (Neraca dan penjelasannya, Laporan Rugi/Laba tahunan buku yang berlalu, laporan posisi keuangan).
 - c. Demi kepentingan semua pihak maka pengurus koperasi dapat meminta audit kepada Akuntan Publik minimal satu kali dalam setahun dan seluruh biaya di tanggung oleh koperasi.
10. Hak dan Wewenang Pengurus
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola dan karyawan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - b. Melakukan hubungan dengan pihak lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
11. Pengurus bertanggung jawab secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau kerugian koperasi yang disebabkan kelalaian pengurus dan anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia tidak terlibat atas kelalaian dalam pelaksanaan organisasi dan usaha koperasi maka anggota pengurus bebas dari tanggungjawabnya.
12. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun.

C. Pengawas

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi pengawas ialah anggota koperasi yang

mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
 - b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan perbukuan.
 - c. Tidak pernah terlibat tindakan pidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan tetap.
 - d. Tidak mempunyai tunggakan.
3. Tugas pengawas adalah
- a. Mengawasi pelaksanaan rapat anggota.
 - b. Memeriksa dan meneliti kebenaran dan buku-buku catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
4. Kewajiban pengawas adalah.
- a. Membuat hasil pemeriksaan secara berkala.
 - b. Membuat hasil pemeriksaan kepada para anggota.
 - c. Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga, kecuali pada pihak penyidik umum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengawas berhak:
- a. Mengumpulkan keterangan-keterangan dari anggota pengurus, anggota, atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - b. Memberikan saran, pendapat dan usul kepada pengurus maupun rapat anggota mengenai segala yang menyangkut kehidupan koperasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengawas dapat memperoleh biaya kerja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
 - d. Meminta jasa akuntan publik untuk memeriksa koperasi atas biaya koperasi.

D. Ketua

1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya
3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
4. Menandatangani surat penting
5. Memimpin Rapat Anggota Tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota
6. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

E. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ke tata usahaan koperasi
3. Menyampaikan hal-hal yang penting kepada ketua
4. Membuat pendataan koperasi.

F. Bendahara

1. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi
2. Membukukan transaksi ke supplier > Rp. 1 juta
3. Pengisian saldo
4. Melakukan Cash Opname yang ada dikasir

G. Pengelola Unit Simpan Pinjam

1. Pengelola unit simpan pinjam harus dilakukan secara terpisah dari unit lainnya
2. Pengelola unit simpan pinjam diangkat oleh pengurus
3. Pengurus yang menjadi pengelola unit simpan pinjam tidak dibenarkan

rangkap pengelolaan unit lainnya

4. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggungjawab kepada pengurus
5. Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa perorangan atau badan usaha termasuk yang berbentuk badan hukum
6. Dalam hal pengurus mengangkat pengelola maka pengawas dapat diadakan apabila dipandang perlu atau ditiadakan sesuai dengan keputusan rapat anggota
7. Apabila Rapat Anggota memutuskan tidak perlu mengangkat pengawas maka pengurus berfungsi sebagai pengawas setara dengan Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas
8. Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 2 pengurus wajib mengadakan Kontrak Kerja dengan pengelola

4.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan pada KPRI Karya maju PGRI Kecamatan Benai telah membuat Laporan Keuangannya. Laporan Keuangan ini akan dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir tahun yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di Koperasi serta setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi seharusnya dikelola. Untuk Laporan Keuangannya sendiri, KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai membuat empat Laporan Keuangan saja pada Tahun 2018, karena untuk Catatan Atas Laporan Keuangannya, KPRI Karya Maju PGRI kecamatan Benai Tidak membuatnya. Berikut adalah ke empat Laporan Keuangan yang dibuat oleh Koperasi tersebut.

4.2.1 Neraca

SAK-ETAP menyebutkan lebih lanjut bahwa Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, yaitu akhir periode pelaporan. Penyajian Neraca tersebut minimal harus mencakup pos-pos mengenai kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. Tabel berikut menggambarkan Laporan Neraca pada tahun 2018:

Tabel 4.1
KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
NERACA
Per 31 Desember 2018

PERKIRAAN	Tahun 2018 (Rp)	PERKIRAAN	Tahun 2018 (Rp)
ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
Aset Lancar		Likuiditas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	43,728,552.76	Hutang usaha	3,160,800.00
Piutang usaha	2,434,292,562.32	Hutang titipan	11,299,332.28
Piutang lain-lain	56,333,525.75	Biaya yang masih harus dibayar	
Persediaan	175,000.00	Simpanan suka rela	468,013,306.00
Jumlah Aset Lancar	<u>2,534,529,640.83</u>	Hutang dana-dana	135,993,552.63
Aset Tidak Lancar		Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>618,466,990.91</u>
Aset Tetap		Liabilitas Jangka Panjang	
Jumlah harga perolehan	52,160,000.00	Hutang jangka panjang	64,571,360.80
Akumulasi penyusutan	45,252,000.00		

Nilai buku aset tetap	<u>6,908,000.00</u>	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>64,571,360.80</u>
Aset Lainnya		Ekuitas	
Aset Lain-lain	11,299,332.28	Modal dari Anggota	
Amortiasasi aset lain-lain	-	Simpan Pokok	40,060,000.00
Nilai buku aset lain-lain	<u>11,299,332.28</u>	Simpan Wajib	1,562,884,500.00
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>18,207,332.28</u>	Modal Tidak Terikat	
JUMLAH ASET	<u>2,552,736,973.11</u>	Donasi	16,250,000.00
		Saldo Laba	
		Cadangan SHU Tahun berjalan	191,628,707.00
			58,875,414.40
		Jumlah Ekuitas	<u>1,869,698,621.40</u>
		JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,552,736,973.11

Sumber: KPRI KARYA MAJU PGRI Kecamatan Benai, 2018

4.2.2 Laporan Laba Rugi

Menurut SAK-ETAP terdapat pos minimal yang harus dipaparkan oleh entitas dalam menyusun Laporan Laba Rugi yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba rugi neto, jumlah tercatat awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas serta jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya kepada pemilik ekuitas.

Laporan Laba Rugi disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja entitas dalam satu periode akuntansi, dalam Koperasi Karya Maju PGRI. Laba

atau Rugi yang diperoleh perusahaan akan masuk mempengaruhi saldo laba dalam neraca dan bersama perubahan komponen ekuitas lainnya, maka disusunlah Laporan Laba Rugi. Tabel berikut menggambarkan Sisa Hasil Usaha pada tahun 2018:

Tabel 4.2

**KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Sisa Hasil Usaha
Per 31 Desember 2018**

Perkiraan	Tahun (2018)
PENGHASILAN	
Pendapatan Penjualan	Rp. 42,784,400.00
Pendapatan Jasa	Rp. 215,955,215.40
Pendapatan Lainnya	Rp. 2,371,643.00
Jumlah Penghasilan	<u>Rp. 261,111,258.40</u>
BEBAN POKOK	Rp. 40,982,200.00
Beban-beban Usaha	<u>Rp. 40,982,200.00</u>
Jumlah Beban Pokok	
	Rp. 220,129,058.40
LABA KOTOR	
BEBAN OPERASI	
Beban Operasi	Rp. 31,000,000.00
Beban Administrasi dan Umum	Rp. 129,717,160.00
Beban Administrasi Lainnya	Rp. 536,484.00
Jumlah Beban Operasi	<u>Rp. 161,253,644.00</u>
LABA SEBELUM PAJAK	<u>Rp. 58,875,414.40</u>
Beban Pajak	<u>Rp. 2,459,975.00</u>
SISA HASIL USAHA TAHUN 2018	Rp. 56,415,439.40

Sumber: KPRI KARYA MAJU PGRI Kecamatan Benai, 2018

4.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas (Perubahan Modal)

Pada SAK-ETAP dijelaskan bahwa entitas menyajikan perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode, baik dalam laporan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Laporan

ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas suatu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode tertentu.

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama dalam penyajian informasi laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban diakui langsung dalam ekuitas, untuk setiap komponen ekuitas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan diakui sesuai SAK-ETAP.

Tabel berikut menggambarkan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun 2018:

Tabel 4.3
KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2018

KETERANGAN	Modal Anggota	Modal Tidak Terikat	Saldo SHU	Saldo Ekuitas
Simpanan Pokok	40,060,000.00			40,060,000.00
Simpanan Wajib	1,562,884,500.00			1,562,884,500.00
Donasi		16,250,000.00		16,250,000.00
Cadangan	191,628,707.00			191,628,707.00
SHU Tahun Berjalan			58,578,414.40	58,578,414.40
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	1,794,573,207.00	16,250,000.00	58,578,414.40	1,869,401,621.40

Sumber: KPRI KARYA MAJU PGRI Kecamatan Benai, 2018

4.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang aliran kas koperasi yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar

selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari tiga aktivitas utamanya, berikut ketiga aktivitas tersebut:

Aktivitas Operasi (*operating activities*)

1. Aktivitas Investasi (*investing activities*)
2. Aktivitas Pendanaan (*financing activities*)

Laporan Arus Kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Metode penyajian laporan arus kas terdiri dari metode langsung, dimana penerimaan kas dari penjualan harus benar-benar merupakan kas yang diterima dari pelanggan, dan metode tidak langsung dimana saldo arus kas sama dengan saldo kas yang terdapat didalam Neraca. Tabel berikut menggambarkan Laporan Arus Kas pada tahun 2018:

Tabel 4.4
KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2018

31 DESEMBER	2 0 1 8
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :	
SHU Bersih	58,875,414.4
Penyesuaian	0
Arus Kas Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja	58,875,414.4
Penurunan (Kenaikan)	0
Piutang Usaha	158,078,709.32

Piutang Lain-lain	-
Persediaan Kenaikan (Penurunan)	(650,000.00)
Hutang Usaha	259,200.00
Hutang Titipan Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(7,993,998.4 4)
Simpanan Sukarela Hutang Dana-dana	(46,216,633. 00) 2,144,302.10
SHU Bagian Anggota	-
Hutang Jangka Panjang	(82,270,308. 00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	82,226,686.38
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :	
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-
Aset Lainnya	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	
Penambahan (Penurunan) Simpanan Pokok	(5,000,000.00)
Simpanan Wajib	(57,908,000.00)
Donasi	-
Cadangan	(64,936,597.20)
SHU Tahun Lalu	(117,342,013.98)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245,186,611.18)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(306,863,420.20)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	513,551,897.76
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	43,728,552.76

Sumber: KPRI KARYA MAJU PGRI Kecamatan Benai, 2018

4.2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian saya untuk Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangannya pada Koperasi Karya Maju PGRI tidak membuat CALK, padahal catatan atas laporan keuangan termasuk laporan keuangan yang harus disajikan menurut SAK-ETAP.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Karya Maju PGRI dengan SAK-ETAP

4.3.2 Tabel 4.5 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Neraca Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI

Membandingkan hasil temuan di lapangan yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI dengan Laporan Neraca menurut SAK-ETAP. Berikut tabel perbandingan antara Laporan Keuangan Neraca Koperasi Karya Maju PGRI dengan SAK-ETAP.

No	Item yang dibandingkan	SAK-ETAP	Koperasi Karya Maju PGRI	Keterangan
1.	Aset	Neraca minimal menyajikan pos-pos berikut: Kas dan Setara Kas Piutang Usaha dan	Pos-pos aset disajikan oleh Koperasi Karya Maju PGRI Aset lancar: Kas Piutang Usaha	Sesuai

		Piutang Lainnya Persediaan Property Investasi (tanah dan bangunan) Aset Tetap	Piutang Lain-lain Persediaan Aset Tidak Lancar: Aset Tetap Jumlah Harga Pokok Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-lain Amortisasi Aset Lain-lain	
2.	Kewajiban	Kewajiban minimal menyajikan pos-pos meliputi: Utang Usaha dan Utang lainnya Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang	Pos-pos kewajiban yang disajikan Koperasi Karya Maju PGRI Likuiditas Jangka Pendek: Utang Usaha Hutang Titipan Biaya yang harus masih dibayar Simpanan Sukarela SHU Bagian Anggota Likuiditas jangka panjang: Hutang jangka panjang	Sesuai
3.	Ekuitas	Entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya Modal	Pos-pos modal yang disajikan oleh Koperasi Karya Maju PGRI Modal dari anggota Modal tidak terikat Saldo Laba	Sesuai

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel diatas penyusunan Neraca pada Koperasi Karya Maju PGRI sudah sesuai dengan kaidah SAK-ETAP, Koperasi Karya Maju PGRI menyajikan informasi mencakup pos-pos aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban dan ekuitas telah sesuai karena akun-akun atau pos-pos dalam Neraca telah disajikan secara terpisah berdasarkan sifatnya masing-masing pos.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bagian Karyawan pada tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“Dalam penyusunan Laporan Neraca telah sesuai dengan SAK-ETAP hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pos-pos akun yang terpisah antara yang ada di koperasi dengan yang ada di SAK-ETAP. Seperti Kelompok Atriva Lancar, Atriva Tetap, Keewajiban dan Ekuitas dan bisa anda lihat juga bahwa koperasi telah melakukan pemisahan antara kewajiban lanacar dan kewajiban jangka panjang”.

4.3.3 Tabel 4.6 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Sisa Hasil Usaha Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada Koperasi Karya Maju PGRI tentang Laporan Sisa Hasil Usaha dengan SAK-ETAP. Berikut tabel perbandingan antara kajian Teori tentang Laporan Sisa Hasil Usaha yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI.

No	Item yang dibandingkan	SAK-ETAP	Koperasi Karya Maju PGRI	Keterangan
1.	Informasi yang disajikan	Laporan Laba Rugi minimal menyajikan pos-pos berikut: Penghasilan Penghasilan usaha Penghasilan diluar usaha Beban Beban usaha Beban diluar usaha Beban pajak Laba atau Rugi Neto	Pos-pos dalam Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karya Maju PGRI Penghasilan Pendapatan Penjualan Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Beban Pokok Beban-beban usaha Beban Operasi Beban Administrasi dan Umum Beban Administrasi Lainnya Beban Pajak Laba usaha	Sesuai
		Entitas harus menyajikan pos, judul, sub	Pendapatan luar usaha (lain-lain)	Sesuai

		jumlah lainnya pada Laporan Laba Rugi jika berpengaruh terhadap pengeluaran dan pemasukkan entitas.		
--	--	---	--	--

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel diatas Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karya Maju PGRI melaporkan pendapatan dan beban selama satu periode. Dalam Laporan Laba Rugi Koperasi Karya Maju PGRI sudah menyajikan pendapatan, beban usaha, laba serta pajak penghasilan. Dalam laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Karya Maju PGRI sudah mengklasifikasi beban berdasarkan sifatnya. Seperti biaya operasional dan biaya administrasi umum dan administrasi lainnya.

Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bagian Karyawan pada tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“Dalam penyusunan Laporan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karya Maju PGRI telah melakukan pengklasifikasian terhadap akun-akun yang ada pada Laporan Laba Rugi di SAK-ETAP, dan untuk Beban Pajak terjadi kesalahan pada saat membuat Laporan Keuangan. Akan tetapi peneliti sudah memperbaikinya.”.

4.3.4 Tabel 4.7 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Perubahan

Ekuitas Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada Koperasi Karya Maju PGRI tentang Laporan Perubahan Modal dengan SAK-ETAP. Berikut tabel

perbandingan antara kajian Teori tentang Laporan Perubahan Modal yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI.

No	Item yang dibandingkan	SAK-ETAP	Koperasi Karya Maju PGRI	Keterangan
1.	Informasi yang disajikan	Entitas menyajikan Laporan Perubahan Modal yang menunjukkan: Laba atau Rugi untuk periode Pendapatan dan / atau beban yang disajikan langsung dalam Ekuitas	Laporan Perubahan Modal yang disajikan oleh Koperasi Karya Maju PGRI: Modal Awal Modal Anggota Modal Tidak Terikat Laba usaha Cadangan SHU Tahun Berjalan Modal akhir	Sesuai
		Laporan Perubahan Modal menyajikan Laba Rugi entitas dan perubahan saldo Laba suatu periode pelaporan		

Sumber: Data Olahan 2020

Dari tabel diatas Koperasi Karya Maju PGRI sudah mencakup komponen yang diatur SAK-ETAP. Dalam laporan perubahan modal Koperasi Karya Maju PGRI sudah memasukkan Modal Awal, Laba, dan Modal Akhir koperasi. Hal ini sudah sesuai dengan SAK-ETAP yang menyatakan bahwa entitas harus menyajikan laba rugi periode, pos pendapatan dan beban yang diakui dalam modal untuk periode tersebut SAK-ETAP (2016:21) paragraf 6.2.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bagian Karyawan pada tanggal 17 Maret 2020:

“Dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang terdapat pada Koperasi Karya Maju PGRI yang mana telah menyajikan pos-pos akun yang ada di SAK-ETAP seperti Modal Awal, Laba, dan Modal Akhir”.

4.3.5 Tabel 4.8 Perbandingan Mengenai Laporan Keuangan Arus Kas

Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada Koperasi Karya Maju PGRI tentang Laporan Arus Kas dengan SAK-ETAP. Berikut tabel perbandingan antara kajian Teori tentang Laporan Arus Kas yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI.

No	Item yang dibandingkan	SAK-ETAP	Koperasi Karya Maju PGRI	Keterangan
1.	Arus kas	Laporan arus kas minimal menyajikan pos-pos berikut: a. Arus kas dari aktivitas operasi - Penurunan piutang simpan pinjam - Penurunan kewajiban lancar - Peningkatan dan pendidikan - Peningkatan dan sosial b. Arus kas dari aktivitas investasi - Penurunan investasi - Peningkatan beban penyusutan c. Arus kas dari	Pos-pos Arus Kas yang disajikan oleh Koperasi Karya Maju PGRI a. Arus kas dari aktivitas operasi - SHU bersih - Penurunan (kenaikan) Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan - Kenaikan (penurunan) Hutang usaha Hutang Titipan Simpanan sukarela Hutang Dana-dana SHU bagian anggota b. Arus kas dari aktivitas investasi - Pengurangan (penambahan)	Kurang sesuai

		aktivitas pendanaan - Penurunan kewajiban jangka panjang - Peningkatan simpanan pokok - Penurunan modal - Peningkatan cadangan Penurunan (kenaikan) kas Kas awal periode Kas akhir periode	- Aset tetap - Aset Lain-lain c. Arus kas dari aktivitas pendanaan - Penambahan (penurunan) - Simpanan pokok - Simpanan wajib - Donasi - Cadangan - SHU Tahun lalu	
--	--	---	--	--

Sumber: Data Olahan 2020

Pada SAK-ETAP Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi yaitu berkaitan dengan operasi dimasa lalu dan masa depan, unsur penghasilan yang berkaitan dengan investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi yaitu Arus Kas investasi sebagai pencerminan pengeluaran kas dan penerimaan sehubungan dengan sumber dana yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan masa depan. Aktivitas pendanaan yaitu berasal dari aktivitas yang menimbulkan perubahan dalam ukuran dan komposisi secara ekuitas dan pinjaman entitas.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Laporan Arus Kas Koperasi Karya Maju PGRI kurang sesuai, karena beberapa akun yang ada pada SAK-ETAP tidak ada pada koperasi.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bagian Karyawan pada tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“Dalam Laporan Arus Kas ada sebagian akun yang ada di SAK-ETAP tidak ditemukan pada laporan di koperasi, Setelah kami lihat kembali ada akun yang tidak dibuat, seperti akun peningkatan beban penyusutan yang memang tidak terdapat pada koperasi kami”.

4.3.6 Perbandingan Mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dengan Koperasi Karya Maju PGRI

Laporan keuangan yang terakhir adalah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Menurut SAK-ETAP paragraf 8.1 Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan negatif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Koperasi Karya Maju PGRI tidak membuat CALK dalam laporan keuangannya, padahal catatan atas laporan keuangan termasuk dalam laporan keuangan yang harus disajikan dalam SAK-ETAP.

Berikut urutan penyajian Catatan Laporan Keuangan adalah.

- a. Entitas harus menyatakan suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*ekplicit and unreserved statement*) atas kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (dasar pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan secara relevan untuk memahami laporan keuangan).

- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain, unsur-unsur yang disajikan didalamnya seperti gambaran umum (pendirian dan perijinan), dan kebijakan Akuntansi.

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dan tidak sesuai dengan SAK-ETAP, karena kurangnya pemahaman dan mengenai fungsi Catatan Atas Laporan Keuangan itu sendiri dan Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan bagian Karyawan pada tanggal 17 Maret 2020 menyatakan bahwa:

“Kami tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan, karena kami menganggap Laporan tersebut hanya sebagai informasi tambahan dari keseluruhan Laporan Keuangannya”.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Laporan Keuangan pada Koperasi Karya Maju PGRI belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP, padahal di dalam Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP ada 5 Laporan keuangan: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk Laporan Keuangan yang ada di Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai Tahun 2018 hanya ada 4 yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, sedangkan untuk Catatan Atas Laporan Keuangan tidak dicantumkan.
2. Dari 4 Laporan Koperasi Karya Maju PGRI, Laporan Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha dan Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan SAK-ETAP, akan tetapi untuk Laporan Arus Kas kurang sesuai karena tidak ditemukan sabagian akun yang ada di Koperasi tidak sesuai dengan SAK-ETAP.

5.2 Saran

- a. Saran untuk Koperasi:
 1. Bagi koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai bisa terus konsisten dalam melakukan pencatatan secara lengkap mengenai aktivitas Laporan Keuangannya yang sesuai dengan SAK-ETAP.
 2. Untuk Sumber Daya Manusianya, koperasi seharusnya merekrut tenaga

kerja berdasarkan latar belakang pendidikannya yang mempunyai kualitas dan kuantitas dibidangnya.

3. Meskipun SAK-ETAP diperuntukkan untuk koperasi tetapi perlu tinjauan kembali terhadap SAK-ETAP. Karena bagi koperasi pun entitas yang nilai asetnya kecil atau rendah, SAK-ETAP dinilai masih terlalu rumit untuk diterapkan.
 4. Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai seharusnya membuat Catatan Atas Laporan Keuangannya, karena Catatan Atas Laporan Keuangan termasuk dalam Laporan Keuangan yang harus disajikan dalam SAK-ETAP, agar seluruh Laporan Keuangan yang ada di Koperasi sesuai dengan ketentuan menurut SAK-ETAP.
- b. Saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Untuk peneliti selanjutnya sebelum melakukan penelitian sebaiknya peneliti perlu meninjau terlebih dahulu koperasi-koperasi yang bersangkutan agar semua Laporan Keuangan berdasarkan SAK-ETAP diterapkan pada koperasi tersebut.
 2. Perlu dilakukan tinjauan langsung terhadap koperasi-koperasi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adri. 2012:3. *Akuntansi keuangan*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Adenk. 2013:4. *Akuntansi Koperasi*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Baswir. 2013:21. *Penerapan SAK-ETAP Terhadap Laporan Keuangan*.Ed
- Fahmi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi pertama cetakan ketujuh, Jakarta:Rajawali Pers.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan. Integrated and comprehensive edition*, Jakarta:PT Gramedia
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta:Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No.1 Tahun 2015
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011:147. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta:Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta:Liberty.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Putra, Mahardika Indra. 2017. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit CV.Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Penerbit CV.Alfabeta, Bandung.
- Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari dan Defia Nurbatin. 2018. *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK-ETAP*. Jakarta:Mitra Wacana Media.

Skripsi & Jurnal

- Alfitri, Arri. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Kec. juwiring Kab. Kelaten*.

- Apriadi, Beni. 2018. *Analisis penerapan SAK-ETAP Pengukuran, Pengakuan Pendapatan dan Beban dalam Menghitung Hasil Sisa Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Tunas Muda Bagan Batu*
- Ariantini. 2014. *Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembaga Sejahtera Mandiri.*
- Andriani dan Liliya. 2014. *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK-ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pazda Interpretatif Pada Peggy Salon).*
- Betiyohana, Sri. 2019. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Perkebunan Soko Jati dan Koperasi Perari Sejahtera Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).*
- Cahyo, Fajar Teguh Nur. 2014. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Studi Kasus Pada Koperasi Batari Solo).*
- Frasawi, Habel Jusuf. 2016. *Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera Di Kota Sorong 2016. Vol. 4, No. 4 Desember 206, Hal 815-823*
- Meyreni, Silvia. 2015. *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Pasar Godanglegi.*
- Mulyani. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang.*
- Nuryani. 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Koperasi KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember. Jurnal Emba. Vol. 3 No 20; November 2013. ISSN 2303-1174*
- Nurdita, Reflesia 2012. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Koperasi yang ada di Kota Dumai.*
- Seragih, Fitriani. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan SAK-ETAP Pada UKM Medan Perjuangan.*
- Siagin, Pardomuan Raven. 2016, *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria*

Wahana Motor. Di Akses Pada Tanggal 8 Desember 2016. Vol. 5, No. 1, Hal 93-121. ISSN 2305-1174.

Yelitasari, Viona. 2016 *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi (Studi kasus pada Koperasi di Bandar Lampung)*

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2015. *KUKM Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi No.12 Tahun 2015*. Jakarta:Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik indonesia.

Republik Indonesia. 1992. UU Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Pokok-pokok Perkoperasian* Jakarta:Sekretariat Negara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Sejarah berdirinya Koperasi

1. Bagaimana Sejarah berdirinya koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai?
2. Bagaimana tujuan didirikannya Koperasi ini?
3. Apa Visi dan Misi KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai?

B. Struktur Organisasi

1. Bagaimana bentuk struktur organisasi KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai?
2. Bagian apa saja yang ada pada Koperasi?
3. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam Koperasi?
4. Berapa jumlah anggota yang ada di Koperasi tersebut?

C. Jam Kerja

1. Pukul berapa karyawan mulai bekerja?
2. Jika ada waktu istirahat, berapa lama waktu yang diberikan dan pada pukul berapa?

D. Bendahara

1. Diperuntukkan untuk siapa saja Koperasi, apakah hanya untuk Guru saja atau untuk unit simpan pinjaman lainnya?
2. Koperasi ini bergerak dalam bidang apa saja?
3. Bagaimana cara pengelolaan keuangan pada Koperasi?
4. Darimana asal modal Koperasi?
5. Apakah Koperasi ini telah menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan Laporan Keuangannya?

6. Sejak kapan penerapan SAK-ETAP diterapkan pada Koperasi ini?
7. Apa saja Laporan Keuangan yang digunakan dalam Koperasi?
8. Apakah semua Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SAK-ETAP?
9. Berapa jumlah anggota yang harus mengikuti RAT?
10. Jika tidak semua anggota bisa hadir dalam RAT, bagaimana Rapat tersebut berjalan dengan semestinya?
11. Kapan RAT tersebut dilaksanakan?

12. A. Neraca

1. Apakah Laporan Keuangan Neraca Koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP?
2. Apakah ada ditemukan komponen akun yang tidak terdapat pada Laporan Neraca?

B. SHU

1. Apakah semua akun yang ada pada Laporan SHU Koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP?
2. Apakah Laporan SHU pada Koperasi mengalami Laba atau Rugi pada Tahun 2018?

C. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Apakah semua akun yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP?

D. Arus Kas

1. Apakah semua akun yang ada pada Laporan Arus Kas Koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP?
2. Komponen apa saja yang tidak ada pada Koperasi tersebut?
3. Kenapa pada laporan tersebut terdapat komponen yang tidak ditemukan?

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Apakah semua akun yang ada pada Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi telah sesuai dengan SAK-ETAP?
2. Mengapa Catatan Atas Laporan Keuangan tidak digunakan pada Koperasi ini?
3. Jika tidak menggunakan CALK, apakah ada pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan lainnya dan pada Koperasi?

F. Hambatan

1. Apakah ada kendala dalam menyusun Laporan Keuangan pada Koperasi yang disusun berdasarkan SAK-ETAP?
2. Jika ada kendala, kendala apa saja yang ditemukan?

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
NERACA

Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKIRAAN	Tahun 2018 (Rp)	PERKIRAAN	Tahun 2018 (Rp)
ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
Aset Lancar		Likuiditas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	Rp 43,728,552.76	Hutang Usaha	Rp 3,160,800.00
Piutang Usaha	Rp 2,434,292,562.32	Hutang Titipan	Rp 11,299,332.28
Piutang Lain-Lain	Rp 56,333,525.75	Biaya yang masih harus dibayar	-
Persediaan	Rp 175,000.00	Simpanan suka rela	Rp 468,013,306.00
Jumlah Aset Lancar	Rp 2,534,529,640.83	Hutang Dana-dana SHU bagian anggota	Rp 135,993,552.63
Aset Tidak Lancar		Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp 618,466,990.91
Aset Tetap			
Jumlah Harga Perolehan	Rp 52,160,000.00	Liabilitas Jangka Panjang	
Akumulasi Penyusutan	-Rp 45,252,000.00	Hutang Jangka Panjang	Rp 64,571,360.80
Nilai Buku Aset Tetap	Rp 6,908,000.00	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Rp 64,571,360.80
Aset Lainnya		Ekuitas	
Aset Lain-lain	Rp 11,299,332.28	Modal dari anggota	
Amortiasasi Aset Lain-lain	-	Simpan Pokok	Rp 40,060,000.00
Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp 11,299,332.28	Simpan Wajib	Rp 1,562,884,500.00
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp 18,207,332.28	Modal tidak terikat	
JUMLAH ASET	Rp 2,552,736,973.11	Donasi	Rp 16,250,000.00
		Saldo Laba	-
		Cadangan	Rp 191,628,707.00

SHU Tahun Berjalan	Rp 58.875.414.40
Jumlah Ekuitas	Rp 1.869.698.621.40
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 2.552.736.973.11

Benai Kecil, 30 Juni 2020

Pengurus

Koperasi Karya Maju PGRI

Ketua

 TUKIMUN S.Sos

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Laporan SISA HASIL USAHA
Per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

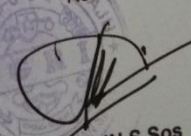
Perkiraan	Tahun (2018)
PENGHASILAN	
Pendapatan Penjualan	Rp. 42,784,400.00
Pendapatan Jasa	Rp. 215,955,215.40
Pendapatan Lainnya	Rp. 2,371,643.00
Jumlah Penghasilan	<u>Rp. 261,111,258.40</u>
BEBAN POKOK	
Beban-belan Usaha	Rp. 40,982,200.00
Jumlah Beban Pokok	<u>Rp. 40,982,200.00</u>
LABA KOTOR	Rp. 220,129,058.40
BEBAN OPERASI	
Beban Operasi	Rp. 31,000,000.00
Beban Administrasi dan Umum	Rp. 129,717,160.00
Beban Administrasi Lainnya	Rp. 536,484.00
Jumlah Beban Operasi	<u>Rp. 161,253,644.00</u>
LABA SEBELUM PAJAK	<u>Rp. 58,875,414.40</u>
Beban Pajak	Rp. 2,459,975.00
SISA HASIL USAHA TAHUN 2018	Rp. 56,415,439.40

Benai Kecil, 30 Juni 2020

Pengurus

Koperasi Karya Maju PGRI

Ketua


TUKIMUN S. Sos

KPRI KARYA MAJU PGRI
Laporan Perubahan Ekuitas
PER 31 DESEMBER 2018
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Anggota	Modal Tidak Terikat	Saldo SHU	Saldo Ekuitas
Simpanan Pokok	40,060,000.00			40,060,000.00
Simpanan Wajib	1,562,884,500.00			1,562,884,500.00
Donasi		16,250,000.00		16,250,000.00
Cadangan	191,628,707.00		58,875,414.40	191,628,707.00
SHU Tahun Berjalan				58,875,414.40
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	1,794,573,207.00	16,250,000.00	58,875,414.40	1,869,698,621.40

Benai Kecil, 30 Juni 2020

Pengurus

Koperasi Karya Maju PGRI

Ketua

TUKUMUN S. Sos

KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai

Laporan Arus Kas

Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 DESEMBER	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :	
SHU Bersih	58,875,414.40
Penyesuaian	
Arus Kas Bersih Sebelum Perubahan	
Modal Kerja	58,875,414.40
Penurunan (Kenaikan)	
Piutang Usaha	158,078,709.32
Piutang Lain-lain	-
Persediaan	(650,000.00)
Kenaikan (Penurunan)	
Hutang Usaha	259,200.00
Hutang Titipan	(7,993,998.44)
Biaya Yang Masih Harus	
Dibayar	-
Simpanan Sukarela	(46,216,633.00)
Hutang Dana-dana	2,144,302.10
SHU Bagian Anggota	-
Hutang Jangka Panjang	(82,270,308.00)
	82,226,686.38
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :	
Pengurangan (Penambahan)	-
Aset Tetap	-
Aset Lainnya	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Investasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :	
Penambahan (Penurunan)	(5,000,000.00)
Simpanan Pokok	(57,908,000.00)
Simpanan Wajib	-
Donasi	(64,936,597.20)
Cadangan	

SHU Tahun Lalu	(117,342,013.98)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(245,186,611.18)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(306,863,420.20)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	513,551,897.76
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	43,728,552.76

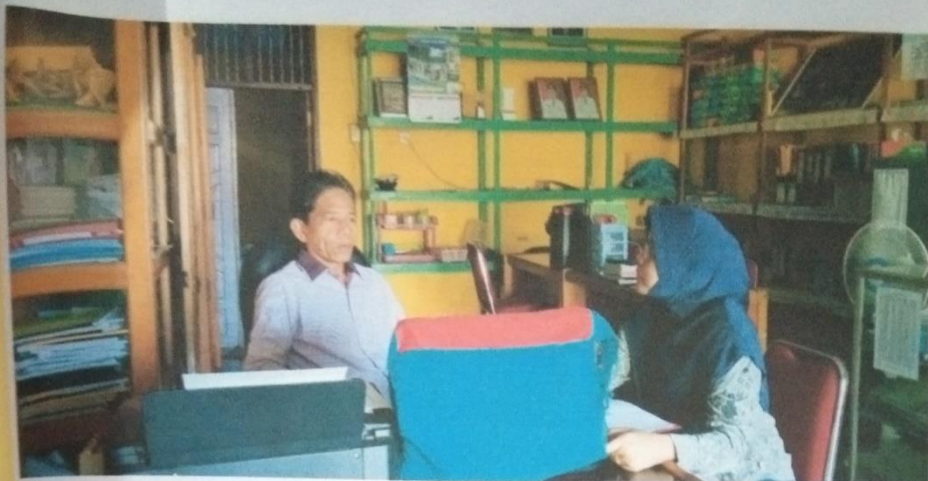
Benai Kecil, 30 Juni 2020

Pengurus

Koperasi Karya Maju PGRI

Ketua

TUKIMUN S.Sos





**KOPERASI KARYA MAJU
KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SURAT KETERANGAN
NO: 012/KPRI-KM/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUKIMANS.Sos
Jabatan : Ketua Koperasi Karya Maju PGRI Kecamatan Benai
Alamat : Teratak Air Hitam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HIFSA WULANDARI
NPM : 160412019
Prodi : Akuntansi
Alamat : Desa Benai Kecil Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa nama yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Koperasi Karya Maju PGRI di Desa Benai Kecil dan Data yang telah diteliti benar adanya.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benai Kecil, 30 Juni 2020

Pengurus

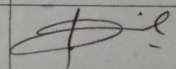
Koperasi KaryaMaju PGRI

ketua

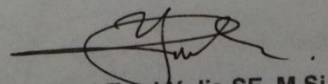


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HIFSA WULANDARI
 NPM : 160412019
 Pembimbing I : RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 Pembimbing II : ZUL AMMAR, SE., ME
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada Koperasi
 KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	29/2019 /10	Revisi SeSuai yang disarankan	Rn	
2	11/19 /12 Rn	Revisi Latar Belakang dan Bab II	Rn	
3	19/2020 /01	Perbaiki rumusan masalah, cara pengutipan literatur belakang, rumusan tambahan teori, SAK-ETAP, rumusan tujuan, rumusan hipotesis, rumusan pertanyaan	Rn	
4	21/20 /1	Perbaiki latar belakang masalah, kerangka berpikir, analisis data literatur skripsi yang sama.	Rn	
5	23/20 /1	Perbaiki latar belakang, Perbaiki Bab III	Rn	
6	24/20 /1	lansut ke pb II	Rn	
7	28/20 /1	Acc		
8	29/20 /1	Acc skempro	Rn	
9				
10				

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi


Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN.1014038901

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HIFSA WULANDARI
 NPM : 160412019
 Pembimbing I : RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 Pembimbing II : ZUL AMMAR, SE., ME
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan SAK-ETAP Pada KPRI Karya Maju PGRI Kecamatan Benai

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	23/2020 6	1. Perbaiki pendirian 2. Revisi tabel 3. Lampiran lap. keuangan 4. Perbaiki rekap & penjabaran 5. Perbaiki kelengkapan & format	Rn	
2	1/2020 7	lanjut Bab II	Rn	
3	8/2020 7	- ABSTRACT - RIOPATA - METODOLOGI KUALITATIF		
4	10/2020 7	- Tagline pendirian - kesimpulannya		
5	10/2020 7	- ACC kumpang		
6	11/2020 7	- ACC kumpang	Rn	
7				

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Yulis, SE., M.Si
 NIDN: 1014038901

BIODATA

Identitas Diri

Nama : HIFSA WULANDARI
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru , 11 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Dusun Danau Kompe, Desa Benai Kecil
Telpon Rumah dan HP : 081371342271
Alamat E-mail : hifsawulandari93@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : SD N 003 Benai Kecil (2004-2010)
SMP N 1 Benai (2010-2013)
SMA N 1 Benai (2013-2016)

Pendidikan Non Formal : -

Riwayat Prestasi

Pertasi Akademik : SD peringkat 10 besar kelas III (semester I dan II)
dan peringkat 10 besar kelas IV-VI (semester I dan II)
SMP Peringkat 5 kelas VII (semester I dan II)
SMP Peringkat 3 kelas VIII (semester II)
SMP Peringkat 5 Besar kelas XI (semester I dan II)

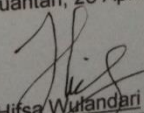
Prestasi Non Akademik : MTQ mengaji, cerdas cermat, pidato Tingkat Kecamatan Benai

Pengalam:

Organisasi:
1. OSIS
2. PMI

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 28 April 2020


Hifsa Wulandari
NPM. 160412019